

**Efforts Of The Government's Cooperative And Small And Medium Enterprises Office Medan City In Saving Msmes In The Time Of The Covid 19 Pandemic**

**Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>, Gomgom TP Siregar<sup>2</sup>, Muhammad Ansori<sup>3</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>4</sup>, Cut Nurita<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

<sup>2, 3, 5</sup>Universitas Darma Agung

<sup>4</sup>Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com), <sup>2</sup>[gomgompiresgar@gmail.com](mailto:gomgompiresgar@gmail.com), <sup>3</sup>[ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com),

<sup>4</sup>[pancasp@fh.uisu.ac.id](mailto:pancasp@fh.uisu.ac.id), <sup>5</sup>[cutnurita12@gmail.com](mailto:cutnurita12@gmail.com)

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019, menyebabkan ekonomi dunia kembali bergejolak termasuk ekonomi Indonesia. Dampak perlambatan ekonomi global juga dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak kelapa sawit yang akan terus tertarik ke bawah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 sehingga dipilih dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “ **Upaya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Medan Dalam Menyelamatkan Umkm Di Masa Pandemi Covid 19**”. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara pelaku UMKM di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM Kota Medan: Bahan baku yang lambat menyebabkan adanya beberapa kelangkaan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk UMKM. 1) Terjadinya penurunan terhadap pendapatan, 2) Penurunan permintaan dan penjualan produk, 3) Pengurangan Karyawan, 3) kesulitan untuk melakukan angsuran bank. Sedangkan Upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di masa Pandemi Covid 19 yaitu Penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dengan mengeluarkan beberapa Program di antaranya: bantuan Uang tunai sebesar 2,4 juta setiap UMKM, penundaan cicilan dan bunga Bank selama 6 bulan, e-Katalog dan kakak asuh UMKM.

**Kata Kunci : Upaya, Menyelamatkan, UMKM.**

**Abstract**

*The Covid-19 pandemic, which emerged at the end of 2019, caused the world economy to become volatile again, including the Indonesian economy. The impact of the global economic slowdown is also being felt domestically. Starting from the price of petroleum which is in free fall, as well as the prices of other commodities such as gas and palm oil which will continue to be pulled down. This research aims to determine the Government's efforts to save MSMEs during the Covid 19 Pandemic so that it is deemed necessary to carry out Community Service with the title "**Efforts of the Medan City Government Cooperative and Small and Medium Enterprises Service in Saving MSMEs During the Covid 19 Pandemic**". The data collection technique in this research used interviews with MSME actors in Medan City. Based on the results of research that has been carried out, it can be concluded as follows: The impact of the Covid 19 pandemic on Medan City MSMEs: Slow raw materials have caused several shortages of raw materials used to make MSME products. 1) There is a decline in income, 2) Decrease in demand and product sales, 3) Reduction of employees, 3) difficulty in making bank installments. Meanwhile, the government's efforts to save MSMEs during the Covid 19 pandemic, namely the decline in income and the existence of MSMEs, have slowly experienced a very drastic decline. The government's efforts to save MSMEs by issuing several programs include: cash assistance of 2.4 million for each MSME, postponement of installments and bank interest for 6 months, e-Catalog and foster brother for MSMEs.*

**Keywords: Effort, Saving, MSMEs.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha mikro kecil di kota Medan terbukti mampu menjadi penggerak perekonomian di kota Medan, dan berperan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat kota Medan, usaha sektor kuliner merupakan salah satu usaha yang paling banyak digelut pelaku usaha di Kota Medan. Akan tetapi ada beberapa persoalan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil yang menyebabkan sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah belum mampu meningkatkan pendapatannya ke tingkat yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usahanya. Hal ini berkaitan dengan permasalahan umum yang di alami pelaku usaha selama ini. Permasalahan tersebut antara lain; sumber daya lokal, kegiatan usaha berskala kecil, proses produksi tergolong masih tradisional, dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus, tumbuh dari bakat dan keterampilan yang terbentuk dari pengalaman yang bersifat

turun-temurun, dan tingkat pendidikan dan kreativitas pelaku usaha relatif rendah.<sup>1</sup>

Meskipun usaha kecil dan menengah memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi dalam pengembangannya. Masalah yang paling mendasar pada usaha kecil adalah masalah permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Padahal modal sangat penting dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat.

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

---

<sup>1</sup>Admin Pemerintah Kota Medan, *Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, <https://pemkomedan.go.id/hal-pengembangan-daya-saing->

[koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html](https://pemkomedan.go.id/hal-pengembangan-daya-saing-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html) , di akses pada tanggal 10 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

Penanganan masalah-masalah yang terjadi di sektor UMKM, dapat dimulai dari pemberdayaan usaha kecil yang berada di daerah, mengingat UMKM pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung.<sup>8</sup> Upaya ini telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah. Kota Medan merupakan salah satu daerah yang beberapa tahun terakhir telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan usaha kecil.

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi UMKM sejak adanya Covid 19 ini dan u UMKM lainnya, yang dirasakan itu penurunan penjualan, orang yang beli sedikit terutama yang paling susah itu bahan baku yang langka, karena kan bahan baku ini sangat diperlukan untuk adanya produk.

Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan para pelaku UMKM sesuai yang telah disampaikan di atas merupakan sebuah langkah dan peran tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal perekonomian.

Salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan Pemerintah berupa bantuan uang tunai kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Sebagai tahap awal dan juga berupa penundaan cicilan dan bunga bank selama 6

bulan, jumlah UMKM yang akan menerima bantuan ini sebanyak 9,1 juta UMKM, bantuan ini sedikit banyaknya membantu UMKM yang mengalami penurunan omset dan modal akibat Covid 19. Program ini juga di rasakan semua UMKM yang mengurus bantuan dengan melengkapi berkas yang sudah di tentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota/Kabupaten masing-masing.

### **Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dengan lingkup kerja membantu Walikota Medan dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi UMKM Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi, kerja sama dan fasilitasi koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan jangka menengah, tahunan, di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan dan peningkatan usaha koperasi/usaha mikro kecil menengah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pemberian masukan yang perlu kepada Walikota sesuai bidang dan fungsinya.
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai Dinas Koperasi UMKM Kota Medan untuk dapat eksis, antisipatif dan inovatif yang mendukung dan mempertajam visi dan misi Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan gagasan ini, maka visi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan adalah: Terwujudnya koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang unggul, mandiri, dan mampu menjadi roda perekonomian Kota Medan.

Misi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan merupakan pernyataan yang memberikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adanya misi diharapkan sekaligus memperkenalkan semua kontribusi kepada semua anggota organisasi, termasuk peran apa yang harus diambil, apa program yang harus dilaksanakan dan apa hasil yang ingin diwujudkan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Berdasarkan pemahaman tersebut dan berdasarkan visi

yang telah dirumuskan di atas, maka misi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan adalah:

1. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif dan berdaya saing di Kota Medan.
2. Mengembangkan pola kemitraan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Medan dengan mengoptimalkan seluruh stakeholders yang ada.
3. Data Jumlah UMKM Kota Medan.

Tabel 1  
Rekapitulasi Data UMKM Kota Medan

No	Sektor Usaha	Jlh	%
1	Produksi	301	38,94
2	Kuliner	438	56,66
3	Jasa	31	4,02
4	Peternakan	3	0,38
Jumlah		773	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun. Misalnya pada tahun 2019, total jumlah unit UMKM sebanyak 62.9 Lalu pada tahun 2020 total jumlah unit UMKM 63.5 dalam pemberitaan terakhir, jumlah total jumlah unit UMKM pada tahun 2020 64,2 juta. sedangkan di kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Medan 2020-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2020	173
2	2021	1.206
3	2022	16.620

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan:

Pemerintah Indonesia melalui kementerian Koperasi dan UMKM Memberikan 5 (Lima) Program dalam menyelamatkan UMKM dari dampak Covid 19 yang saat ini di alami di antaranya yaitu:

1. Mendorong 98 persen pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru. "Kami usulkan agar mereka masuk ke dalam kelompok miskin baru agar mendapatkan bantuan sosial. Program bantuan sosial diperluas.
2. Penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan, karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan. Sebab, pemerintah akan menyediakan pembiayaan dengan pajak yang disubsidi sehingga cashflow teratasi
3. Pembiayaan UMKM dan koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apalagi, Teten mengakui masih ada Rp129 triliun dari Rp190 triliun KUR yang belum disalurkan.
4. Mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk UMKM. Apalagi, KemenKop UKM telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ada sekitar Rp735 triliun anggaran belanja pemerintah di tahun 2020.
5. UMKM harus berinovasi dan beradaptasi dengan market baru. Karena, menurut Teten, situasi seperti ini menuntut pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk melakukan inovasi dan adaptasi market baru.

Sejauh ini dukungan yang di berikan pemerintah terhadap UMKM sudah dirasakan UMKM di Kota Medan hal ini terlihat Penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan, dan

menerima bantuan langsung tunai UMKM sebesar Rp. 2.400.000. Akan tetapi tidak semua UMKM merasakan dan mendapatkan hal yang sama, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada UMKM yang berada di Medan Johor, beberapa UMKM mengeluhkan bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran, selain itu adanya beberapa *leasing* dan Bank yang tidak mengindahkan imbauan Pemerintah Untuk penundaan cicilan dan bunga di masa Pandemi COVID 19.

Melihat jumlah UMKM di Indonesia yang tidaklah sedikit, pemerintah turut andil dalam menyusun berbagai skema program pemulihan ekonomi nasional (program PEN) dalam upaya membangkitkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Piter Abdullah juga menuturkan bahwa program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) yang terselenggara optimis dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini melemah karena pandemi covid-19.

## II. Pelaksanaan Kegiatan

### A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di masa pandemi Covid 19 (Objek Penelitian UMKM Kota Medan) dan respon pelaku UMKM terhadap kebijakan penyelamatan UMKM di Kota Medan.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya UMKM di Kota Medan, dimulai dengan mengumpulkan para

peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media in focus, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab.

### **B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami upaya pemerintah Kota Medan dalam menyelamatkan UMKM di masa pandemi covid 19.

### **III. Tindak Lanjut**

Semenjak kemunculan wabah COVID-19, penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Selain itu, masih terdapat permasalahan lain yang dirasakan oleh pelaku UMKM, di antaranya kurangnya sumber daya manusia hingga tidak adanya dukungan kelembagaan. Melihat potensi dan peluang yang dimiliki oleh UMKM dan tidak ingin perekonomian Indonesia semakin terperosok ke dalam krisis, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sosial kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan Pemerintah berupa bantuan uang tunai kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta.

Usaha bantuan yang diberikan tersebut bertujuan guna memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang mengalami penurunan

modal. dimana proses pemberian modal tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM secara langsung melalui rekening mereka masing-masing.

Selain adanya program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa e-katalog, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM guna menangani dan mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan teknologi oleh para pelaku UMKM. Usaha ini juga bertujuan untuk merealisasikan target sebanyak 2 juta para pelaku UMKM beralih pada penggunaan digital dalam usahanya pada akhir tahun 2020.

Selain adanya kebijakan bantuan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM, pemerintah Indonesia mencetuskan kebijakan program penundaan 6 bulan cicilan dan bunga Bank dan program kartu pra kerja. Di mana Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, di mana dalam peraturan tersebut telah mengubah peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Salah satu bentuk perubahannya adalah maksud dan tujuan dari program kartu pra-kerja. Awalnya, program kartu pra kerja hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sekarang penggunaan program telah ditambahkan ke satu poin lagi. Tujuannya untuk mengembangkan kewirausahaan karena dalam program kartu pra-kerja, pelaku UMKM bisa mendaftar nanti. Dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan program kartu pra kerja adalah guna mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan

produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dan guna mengembangkan kewirausahaan.

Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan para pelaku UMKM sesuai yang telah disampaikan di atas merupakan sebuah langkah dan peran tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal perekonomian.

Selain adanya program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa e-katalog, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM guna menangani dan mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan teknologi oleh para pelaku UMKM. Usaha ini juga bertujuan untuk merealisasikan target sebanyak 2 juta para pelaku UMKM beralih pada penggunaan digital dalam usahanya pada akhir tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para pelaku UMKM Kota Medan program ini belum sampai kepada UMKM di Kota Medan dan tidak pernah mengikutinya.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Aries Heru Prasetyo. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

### C. Internet

Admin Pemerintah Kota Medan, *Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, <https://pemkomedan.go.id/hal-pengembangan-daya-saing-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html>, di akses pada tanggal 10 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.